



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KONAWE
NOMOR 49 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang Berbasis Akrual (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan partai politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2017 Nomor 174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 257);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

4. Bupati adalah Bupati Konawe.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

(1) Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

a. Pendapatan Daerah	
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 234.265.462.979,-
2. Pendapatan Transfer	Rp. 1.459.832.934.151,-
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. 13.557.407.275,-
Jumlah Rencana Pendapatan Daerah	Rp. 1.707.655.804.405,-
b. Belanja Daerah	
1. Belanja Operasi	Rp. 1.188.728.099.390,-
2. Belanja Modal	Rp. 208.005.849.430,-
3. Belanja Tidak Terduga	Rp. 6.000.000.000,-
4. Belanja Transfer	Rp. 303.588.041.500,-
Jumlah Rencana Belanja Daerah	Rp. 1.706.321.990.320,-
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan pembiayaan	Rp. 34.346.567.615,-
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 35.680.381.000,-
Surplus/(Defisit)	Rp. 1.333.814.085,-

(2) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah, mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp1.333.814.085 (Satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat belas ribu delapan puluh lima rupiah).

(3) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar (Rp1.333.814.085,00) (Minus satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat belas ribu delapan puluh lima rupiah).

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembayaan;

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Diundangkan di Unaaha
Pada Tanggal, 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,



BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2023 NOMOR : 649

Ditetapkan di Unaaha
Pada Tanggal, 29 Desember 2023

PJ. BUPATI KONAWE,





KABUPATEN KONAWE
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	234.265.462.979,00
4.1.01	Pajak Daerah	104.695.000.000,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	75.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	75.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	75.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	5.700.000.000,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	5.700.000.000,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	5.700.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	550.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	550.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	550.000.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	85.100.000.000,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	85.100.000.000,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	85.100.000.000,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	150.000.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	150.000.000,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	150.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	100.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	100.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	100.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	20.000.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	20.000.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	20.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.000.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.000.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	9.000.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	9.000.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	9.000.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.000.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	3.000.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	3.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	40.112.560.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.040.000.000,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	100.000.000,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	100.000.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	700.000.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	700.000.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	240.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	240.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.632.560.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.075.000.000,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	75.000.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	1.000.000.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	725.000.000,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	725.000.000,00
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	250.560.000,00
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	108.000.000,00
4.1.02.02.03.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan	142.560.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	200.000.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	200.000.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	132.000.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	132.000.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	250.000.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	250.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	36.440.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	10.000.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	10.000.000.000,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	26.440.000.000,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	26.440.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.357.902.979,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	4.357.902.979,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.357.902.979,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.357.902.979,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	85.100.000.000,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00
4.1.04.01.02.0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.05	Jasa Giro	6.000.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.850.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.850.000.000,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	100.000.000,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	100.000.000,00
4.1.04.05.05	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	50.000.000,00
4.1.04.05.05.0001	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	50.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	3.800.000.000,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.800.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.800.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	300.000.000,00
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	100.000.000,00
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	100.000.000,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	200.000.000,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	200.000.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	75.000.000.000,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	75.000.000.000,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	75.000.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.459.832.934.151,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.367.532.912.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.153.760.844.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	165.315.682.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	8.338.209.000,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	4.067.217.000,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	150.889.297.000,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	417.800.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.603.159.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	732.844.053.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	535.000.130.000,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	11.400.000.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	54.598.320.000,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	88.576.506.000,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	28.208.788.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	15.060.309.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	73.061.946.000,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	487.120.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	13.594.802.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	14.782.503.000,00
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	2.293.707.000,00
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	2.061.722.000,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	7.862.935.000,00
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	7.269.085.000,00
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.269.117.000,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	19.440.955.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	182.539.163.000,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	35.378.440.000,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.310.000.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	82.288.362.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.661.357.000,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	2.235.975.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.251.000.000,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	13.514.205.000,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	8.281.384.000,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	572.509.000,00
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	845.000.000,00
4.2.01.01.04.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	30.000.000,00
4.2.01.01.04.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	3.300.200.000,00
4.2.01.01.04.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00
4.2.01.01.04.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	314.131.000,00
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	27.466.600.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	213.772.068.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	213.772.068.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	213.772.068.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	92.300.022.151,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	92.300.022.151,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	92.300.022.151,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	9.425.242.296,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	13.287.507.856,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	58.806.767.927,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	7.949.442,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	10.772.554.630,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.557.407.275,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	13.557.407.275,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	13.557.407.275,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	13.557.407.275,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	13.557.407.275,00
	Jumlah Pendapatan	1.707.655.804.405,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.188.728.099.390,00
5.1.01	Belanja Pegawai	737.304.916.761,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	548.051.314.608,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	400.706.097.419,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	268.686.638.409,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	132.019.459.010,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	40.454.238.555,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	25.867.431.258,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	14.586.807.297,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	11.795.211.998,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	11.795.211.998,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	18.089.866.857,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	18.072.617.457,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	17.249.400,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	12.611.650.486,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.239.528.286,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	9.372.122.200,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	27.059.433.687,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	16.082.905.183,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	10.976.528.504,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.910.883.224,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.910.883.224,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	6.144.506,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.932.345,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.212.161,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	30.008.100.471,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	23.067.935.639,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	6.940.164.832,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.500.000.000,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.500.000.000,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.909.687.405,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.909.687.405,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	44.167.290.762,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	42.998.365.350,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	42.998.365.350,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.168.925.412,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.168.925.412,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	87.616.994.000,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	82.288.362.000,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	82.288.362.000,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	2.235.975.000,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	2.235.975.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.661.357.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	2.661.357.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	231.300.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12.000.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	219.300.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	200.000.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	200.000.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	15.664.062.640,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	688.584.750,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	688.584.750,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	38.823.823,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	38.823.823,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	62.021.756,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	62.021.756,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	60.497.089,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	60.497.089,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	998.447.888,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	998.447.888,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	90.253.800,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	90.253.800,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	3.891.853.455,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	3.891.853.455,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	968.625.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	968.625.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	945.079,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	945.079,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.205.250.000,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	112.250.000,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	23.000.000,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	20.000.000,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	4.050.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.374.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.374.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	284.760.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	284.760.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	207.522.751,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	29.400.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	29.400.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	52.920.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	52.920.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	1.013.880,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	1.013.880,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	894.950,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	894.950,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.121,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.121,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	123.292.800,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	123.292.800,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	606.640.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	206.640.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	206.640.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	1.430.000.000,00
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	1.430.000.000,00
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	1.430.000.000,00
5.1.01.89	Belanja Pegawai BOSP	6.561.092.000,00
5.1.01.89.01	Belanja Pegawai BOSP-BOS	6.440.942.000,00
5.1.01.89.01.0001	Belanja Pegawai BOSP-BOS Reguler	6.440.942.000,00
5.1.01.89.02	Belanja Pegawai BOSP-BOP PAUD	120.150.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.89.02.0001	Belanja Pegawai BOSP-BOP PAUD Reguler	120.150.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	33.000.000.000,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	33.000.000.000,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	33.000.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343.430.038.857,00
5.1.02.01	Belanja Barang	78.297.232.692,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	78.085.984.092,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.915.720.800,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	165.497.100,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.767.606.800,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	209.951.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.758.100.000,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	12.000.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	222.850.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.206.110.700,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	444.655.400,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	64.790.000,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	2.714.733.182,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	16.900.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	46.846.650,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.004.002.346,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	275.426.100,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.210.390.459,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	233.440.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	149.285.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	457.968.900,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	840.336.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	565.036.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	110.130.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	8.500.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.065.471.990,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.714.764.500,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	810.493.445,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.577.245.900,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.156.879.000,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	249.277.900,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.945.728.220,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.396.424.800,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	108.500.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.064.505.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.429.306.900,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	15.000.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	74.500.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	8.200.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	261.750.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	325.500.000,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	624.650.000,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	57.750.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	390.410.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	40.850.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	818.500.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	550.000.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.753.600,00
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	1.753.600,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	209.495.000,00
5.1.02.01.04.0038	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	45.470.000,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	64.500.000,00
5.1.02.01.04.0409	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	52.500.000,00
5.1.02.01.04.0455	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya	47.025.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	117.835.392.855,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	100.479.408.025,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.968.019.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.520.466.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	270.000.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	302.400.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	25.760.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	3.600.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	508.062.500,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	520.800.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	840.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	22.893.322.717,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	689.900.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.006.252.729,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.999.047.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	821.000.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	720.000.000,00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	1.197.000.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	0,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	61.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3.084.000.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	6.672.000.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	13.266.800.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.372.771.600,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	9.969.360.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.909.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.537.000.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	75.000.000,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	200.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	274.600.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	25.875.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	115.600.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	3.800.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	7.200.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	905.700.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.418.092.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	120.468.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	100.500.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	7.052.500.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	107.800.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	97.500.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	6.094.375.179,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	255.500.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.987.700.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	97.786.300,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	381.850.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	7.606.398.400,00
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	400.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	6.981.508.800,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	224.889.600,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.127.010.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	456.550.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	7.500.000,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	163.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	363.160.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	22.500.000,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	5.000.000,00
5.1.02.02.04.0148	Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya	2.000.000,00
5.1.02.02.04.0203	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	15.000.000,00
5.1.02.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer	20.000.000,00
5.1.02.02.04.0409	Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	7.000.000,00
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	800.000,00
5.1.02.02.04.0465	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	64.500.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.069.500.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	150.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	270.000.000,00
5.1.02.02.05.0032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	880.000.000,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	90.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	581.500.000,00
5.1.02.02.05.0049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	48.000.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	50.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.786.059.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	2.731.110.000,00
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	124.839.000,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	0,00
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	350.000.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.052.110.000,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	0,00
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	200.000.000,00
5.1.02.02.08.0034	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	28.000.000,00
5.1.02.02.08.0035	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	300.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	600.000.000,00
5.1.02.02.09.0020	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata	400.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.09.0021	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-an-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisata-an	200.000.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	273.600.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	273.600.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	893.417.430,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	311.022.430,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	582.395.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	11.490.709.550,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.360.980.000,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	400.000.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	959.980.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	70.920.000,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	628.000.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	61.500.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	93.330.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	105.850.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	41.400.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.728.128.550,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.541.831.550,00
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	1.365.000.000,00
5.1.02.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1.246.412.000,00
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	15.000.000,00
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.845.000.000,00
5.1.02.03.03.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	706.485.000,00
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	8.400.000,00
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	1.000.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.401.601.000,00
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	797.750.000,00
5.1.02.03.04.0023	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	75.000.000,00
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	474.741.000,00
5.1.02.03.04.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.04.0035	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	54.110.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	78.447.383.760,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	78.447.383.760,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.445.564.360,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	28.474.419.400,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	38.522.400.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.000.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.151.500.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.151.500.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.294.000.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	130.000.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	727.500.000,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	18.457.820.000,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	17.947.295.000,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	17.947.295.000,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	461.325.000,00
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	461.325.000,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	49.200.000,00
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	49.200.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	36.750.000.000,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	36.750.000.000,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	36.750.000.000,00
5.1.03	Belanja Bunga	1.821.047.057,00
5.1.03.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	1.821.047.057,00
5.1.03.01.02	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	1.821.047.057,00
5.1.03.01.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	1.821.047.057,00
5.1.05	Belanja Hibah	105.954.496.715,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	96.959.716.715,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	67.541.103.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	67.531.103.000,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.876.188.700,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.765.000.000,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	7.111.188.700,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	18.023.855.015,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.734.000.000,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	12.289.855.015,00
5.1.05.05.05	Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	518.570.000,00
5.1.05.05.05.0001	Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	518.570.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.000.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.000.000.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	8.328.880.000,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	8.328.880.000,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	8.328.880.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	665.900.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	665.900.000,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	665.900.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	217.600.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	160.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	160.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	160.000.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	57.600.000,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	57.600.000,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	57.600.000,00
5.2	BELANJA MODAL	208.005.849.430,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.500.000.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	1.500.000.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	1.500.000.000,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.500.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.492.419.978,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	19.925.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	19.925.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	11.715.000,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	8.210.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.047.500.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.047.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	722.400.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.230.000.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	95.100.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	50.500.000,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	38.700.000,00
5.2.02.03.01.0001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	7.350.000,00
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	29.700.000,00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	1.650.000,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	800.000,00
5.2.02.03.02.0006	Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)	800.000,00
5.2.02.03.02.0010	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	0,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	11.000.000,00
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	4.000.000,00
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	7.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.015.229.228,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.805.605.360,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	93.505.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.712.100.360,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.202.873.868,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.582.678.800,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	85.750.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	539.580.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	72.985.300,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	913.981.200,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	7.898.568,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	6.750.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	6.750.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.831.721.850,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	1.783.518.700,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	119.500.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1.497.548.700,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	166.470.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	48.203.150,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	48.203.150,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.423.015.100,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	21.846.000,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.496.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	20.350.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	2.401.169.100,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.401.169.100,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.101.552.200,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.651.552.200,00
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	1.651.552.200,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.450.000.000,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	50.000.000,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	1.400.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.467.767.700,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.080.567.700,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	958.067.700,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	122.500.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	387.200.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	118.400.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	268.800.000,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	91.300.000,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	91.300.000,00
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	87.300.000,00
5.2.02.13.01.0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	4.000.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	135.639.900,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	31.619.900,00
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	29.347.700,00
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	2.022.200,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	250.000,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	104.020.000,00
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	82.500.000,00
5.2.02.15.03.0004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	21.520.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	29.250.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	29.250.000,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	4.500.000,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	24.750.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	260.000.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	260.000.000,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	260.000.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.019.019.000,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.019.019.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.019.019.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	101.896.138.368,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	81.660.753.368,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	80.136.961.781,00
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	3.382.800.000,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	18.511.317.510,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	212.000.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	48.495.844.271,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	5.313.600.000,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.571.400.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	450.000.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	200.000.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.523.791.587,00
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	1.523.791.587,00
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	750.000.000,00
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	750.000.000,00
5.2.03.02.01.0002	Belanja Modal Tugu	750.000.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	19.485.385.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	19.485.385.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	19.485.385.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	68.588.018.654,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	52.034.543.600,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	47.809.543.600,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	41.422.595.600,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	6.386.948.000,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	4.225.000.000,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	4.150.000.000,00
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	75.000.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	12.046.700.054,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	8.063.541.800,00
5.2.04.02.01.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	0,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	3.663.541.800,00
5.2.04.02.01.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	4.400.000.000,00
5.2.04.02.01.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	0,00
5.2.04.02.01.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	0,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	488.765.000,00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	488.765.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	138.019.545,00
5.2.04.02.06.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	138.019.545,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	3.356.373.709,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	3.356.373.709,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	0,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	0,00
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	4.506.775.000,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	1.851.300.000,00
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	1.851.300.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	2.655.475.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	2.655.475.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.459.272.430,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	935.768.430,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	935.768.430,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	37.948.250,00
5.2.05.01.01.0010	Belanja Modal Serial	71.400.000,00
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	826.420.180,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	155.000.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	15.000.000,00
5.2.05.02.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	15.000.000,00
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	100.000.000,00
5.2.05.02.02.0004	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	100.000.000,00
5.2.05.02.03	Belanja Modal Tanda Penghargaan	40.000.000,00
5.2.05.02.03.0001	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	40.000.000,00
5.2.05.03	Belanja Modal Hewan	0,00
5.2.05.03.01	Belanja Modal Hewan Piaraan	0,00
5.2.05.03.01.0004	Belanja Modal Hewan Piaraan Lainnya	0,00
5.2.05.03.02	Belanja Modal Ternak	0,00
5.2.05.03.02.0004	Belanja Modal Ternak Lainnya	0,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.368.504.000,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.368.504.000,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.368.504.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	7.070.000.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.820.000.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.820.000.000,00
5.2.06.01.01.0001	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Goodwill	30.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	790.000.000,00
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	1.000.000.000,00
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	5.250.000.000,00
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	5.250.000.000,00
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	5.250.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	303.588.041.500,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	303.588.041.500,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	303.588.041.500,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	303.588.041.500,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	213.772.068.000,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	89.815.973.500,00
	Jumlah Belanja	1.706.321.990.320,00
	Total Surplus/(Defisit)	1.333.814.085,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	34.346.567.615,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	34.346.567.615,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	34.346.567.615,00
6.1.01.07.02	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	34.346.567.615,00
6.1.01.07.02.0001	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	34.346.567.615,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	35.680.381.700,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	35.680.381.700,00
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	35.680.381.700,00
6.2.03.01.05	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah	35.680.381.700,00
6.2.03.01.05.0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah	35.680.381.700,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	35.680.381.700,00
	Pembiayaan Netto	-1.333.814.085,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Konawe, 29 Desember 2023

Pj Bupati



Dr. HARMIN RAMBA, SE., MM

